

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan aparat desa yang juga disertai tugas dibidang administrasi, menduduki posisi yang sangat penting karena sebagai organ pemerintahan yang paling bawah mengetahui secara pasti segala kondisi dan permasalahan yang ada di wilayahnya, maka input pada pemerintah kecamatan yang menyangkut berbagai keterangan dan informasi sangatlah dibutuhkan dalam pengambilan kebijaksanaan daerah maupun nasional untuk kebutuhan pembangunan secara menyeluruh. Dengan demikian kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan penyajian data dan informasi yang dibutuhkan, semakin dituntut adanya kerja keras dan kemampuan yang optimal guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan.¹

Berangkat dari pemikiran tersebut, dikaitkan dengan kondisi riil sementara Aparat Desa Moramam Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor sebagai tempat penelitian yang direncanakan ini, menurut pengamatan awal penulis, menunjukkan bahwa kemampuan kepala Desa Moramam dalam pelaksanaan tugas terutama dalam menyiapkan bahan dan informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan perencanaan pembangunan, hasilnya masih minim atau belum terlaksana secara optimal. Hal ini diduga karena kemampuan SDM memainkan peranan penting dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi yang tidak terlaksana dengan baik dan konsisten sesuai ketentuan, baik administrasi umum, administrasi penduduk, maupun administrasi keuangan. Kondisi tersebut juga didukung dengan beberapa fenomena sebagai berikut :

1. Belum tersedianya informasi atau pencatatan administrasi di Desa Moramam secara

¹Ibid. Hal 2

baik. Sebagaimana hal itu terjadi karena adanya pengaruh berbagai faktor, antara lain terutama diduga faktor kemampuan sumber daya aparat desa sebagai penyelenggara yang belum optimal.

2. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa Moramam yang terpenting adalah bagaimana pemerintahan desa mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa, dan mampu meningkatkan daya saing desanya. Hal tersebut hanya mungkin terwujud apabila urusan yang menjadi kewenangan desa dapat terlaksana dengan baik. Tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam implementasinya terdapat berbagai permasalahan yang langsung maupun tidak langsung menghambat pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan tersebut. Contoh permasalahan langsung dalam pelaksanaan tugas administrasi tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan sedangkan permasalahan tidak langsung dalam urusan administrasi tidak diimplementasikan dengan aturan akan tetapi dari kepribadian atau kemauan seorang pemimpin.
3. Kapasitas Pemerintahan Desa yang masih rendah merupakan bagian dari permasalahan yang ditunjukkan di lapangan. Diantaranya masih belum optimalnya aspek kelembagaan, sumberdaya manusia, maupun manajemen pemerintahan desa pada tahun 2019.

Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah, telah melaksanakan Kajian Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa, kajian ini telah menghasilkan cetak biru yang memuat strategi-strategi penyelesaian masalah penyelenggaraan pemerintahan desa dan menyusun peningkatan kapasitas pemerintahan desa. Lebih lanjut merupakan hasil identifikasi aspek kapasitas yang perlu ditingkatkan yaitu Perencanaan dan Penganggaran Desa, Keuangan Desa, Penyusunan Kebijakan Desa, Kepemimpinan Kepala Desa. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, menurut penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam. Terkait

pelaksanaan tugas dan dasar dari pemerintah desa, yang dirumuskan dalam proposal penelitian sebagai berikut :

**“KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI PENDUDUK DI DESA MORAMAM
KECAMATAN ALOR BARAT DAYA KABUPATEN ALOR”**

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Kualitas Pelayanan Administrasi Penduduk Di Desa Moramam, Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis Kualitas Pelayanan Administrasi Penduduk Di Desa Moramam Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan sebagai :

1. Bahan informasi dan kontribusi pemikiran kepada pemerintah Desa Moramam dan masyarakat serta kepada semua pihak yang berkepentingan dalam upaya meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas administrasi desa seperti administrasi umum: Berisi pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintah desa, administrasi penduduk: Berisi pencatatan data dan informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk, administrasi keuangan: Berisi pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa, administrasi pembangunan: Berisi pencatatan data dan informasi pembangunan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan, dan administrasi badan permusyawaratan desa: Berisi pencatatan data dan informasi berkaitan dengan BPD.
2. Bahan perbandingan dan informasi awal bagi peneliti lain yang hendak mengkaji secara mendalam tentang pelaksanaan tugas-tugas administrasi desa pada umumnya dan register desa pada khususnya.

